

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS PEMBAJAKAN FILM DI ERA DIGITAL GUNA MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti masih lemahnya perlindungan hukum terhadap praktik pembajakan film yang terus berkembang pesat di era digital, terutama melalui *platform* seperti Telegram dan situs *streaming* ilegal. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi para pencipta film. Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dinamika sosial-hukum, serta studi kasus yang relevan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deduktif guna menghasilkan pemahaman yang mendalam dan sistematis. Temuan utama menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta digital belum berjalan secara efektif, disebabkan oleh ketidakjelasan norma dalam Pasal 40 ayat (1) huruf m dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang menghambat proses penegakan hukum. Ketidaktepatan regulasi ini mengindikasikan bahwa instrumen hukum yang ada belum mampu menjawab kompleksitas pelanggaran di ruang digital yang terus berevolusi. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa diperlukan pembaruan hukum yang lebih tegas dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait, demi terciptanya sistem perlindungan hukum yang menyeluruh dan mampu melindungi hak ekonomi maupun moral para pencipta karya sinematografi.

Kata kunci: *Hak Cipta, Film, Perlindungan Hukum, Pembajakan Digital, Kepastian Hukum, Era Digital, Undang-Undang Hak Cipta.*

LEGAL PROTECTION FOR CREATORS AGAINST FILM PIRACY IN THE DIGITAL ERA TO ENSURE LEGAL CERTAINTY

ABSTRACT

This research highlights the continued weakness of legal protection against the rapidly growing practice of film piracy in the digital era, especially through platforms such as Telegram and illegal streaming sites. The main objective of this study is to identify and analyze applicable legal provisions, as well as to evaluate the effectiveness of government policies in ensuring legal certainty for film creators. The method used is a normative juridical approach, by examining laws and regulations, socio-legal dynamics, and relevant case studies. Research data is sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed deductively to produce a deep and systematic understanding. The main findings indicate that legal protection against digital copyright infringement has not been effective, due to the ambiguity of norms in Article 40 paragraph (1) letter m and Article 55 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014, which hinders the law enforcement process. This regulatory inaccuracy indicates that existing legal instruments have not been able to address the complexity of violations in the constantly evolving digital space. Therefore, it is concluded that legal reforms are needed that are more firm and responsive to the development of information technology, as well as increased coordination among related institutions, in order to create a comprehensive legal protection system capable of protecting both the economic and moral rights of cinematographic creators.

Keywords: Copyright, Film, Legal Protection, Digital Piracy, Legal Certainty, Digital Era, Copyright Law.